

KONDISI TERKINI KEHUTANAN KUTAI BARAT

Oleh :
Kelompok Kerja Program Kehutanan Daerah Kutai Barat
(KK-PKD)

Potret Kehutanan Kutai Barat :

merupakan kumpulan informasi kehutanan terkini, hasil dari proses konsultasi parapihak, sebagai dokumen awal yang digunakan dalam penyusunan Program Kehutanan

Bentuk Keterlibatan Masyarakat : HPHH; memberikan peningkatan ekonomi masyarakat melalui kemitraan.

Dengan HPHH pengelolaan hutan lebih transparan

Pemanfaatan Kayu : terutama ke Samarinda dan ke luar daerah, dan sawmill setempat

Konflik yg berkembang a.l. : *overlapping* pemanfaatan lahan, konflik pengusaha dg masyarakat.

Dampak lain dari pengelolaan hutan: gaya hidup konsumtif, luntarnya nilai adat, rusaknya ekosistem hutan.

Peluang Berjalannya Program

Kubar adalah kabupaten baru. Sebagai kabupaten baru, memiliki peluang untuk melaksanakan program secara ideal

Terbentuknya Dinas Kehutanan menggantikan CDK akan mendukung berjalannya program

Pelibatan Masyarakat secara positif akan menjadi asset penting

Hutan adalah asset masyarakat Kubar, perlu dikelola dg baik

Terdapat beberapa kegiatan di Kubar, yang melibatkan banyak lembaga seperti lembaga donor (GTZ, NRM), perguruan tinggi (Unsen, Unmul), LSM (Putijaji, SHK, Care International), dll

Tantangan Sektor Kehutanan Kutai Barat

- ~ Tingkat kesulitan geografis, mempengaruhi banyak hal misalnya perhubungan, komunikasi terutama untuk implementasi program kehutanan ke depan
- ~ Ekonomi: Masih bertumpu pada tambang dan pertanian termasuk kehutanan.
- ~ Tekanan terhadap hutan sedemikian tinggi
- ~ Pelayanan umum semisal pelayanan sosial, kesehatan dan pendidikan masih rendah, berpengaruh thdp kualitas kehidupan masyarakat.
- ~ Kualiatas SDM
- ~ Masyarakat belum sepenuhnya ditempatkan sebagai subjek
- ~ Pengelolaan hutan sering berbenturan dengan kebiasaan setempat..
Misalnya : pengelolaan hutan dan hak adat
- ~ Persoalan HPHH yang cukup marak, disamping persoalan HPH dan HTI yang membutuhkan perhatian serius

Permasalahan yang dihadapi

- **Persoalan tatabatas yang berlarut-larut** berdampak kepada persoalan lain seperti klaim adat dan klaim waris.
- Keberadaan hukum formal dianggap belum memihak kepada masyarakat dan masih dipersoalkan
- Adanya kebutuhan untuk **Penerimaan Asli Daerah (PAD)**, disamping desakan masyarakat dan swasta yang berebut kepentingan
- Peran kelompok masyarakat belum mampu memainkan peran yang strategis.

• **SELESAI**